

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Proyek

Kota Dumai, khususnya di wilayah Dumai Timur, saat ini mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat seiring dengan perkembangan ekonomi daerah yang semakin maju. Namun, peningkatan aktivitas masyarakat ini belum diimbangi dengan ketersediaan sarana publik yang memadai, terutama untuk menunjang kegiatan olahraga dan pertemuan massal. Selama ini, minimnya gedung olahraga di wilayah tersebut mengakibatkan program pembinaan atlet daerah serta penyelenggaraan acara kemasyarakatan berskala besar sering kali terkendala karena ketiadaan fasilitas yang mumpuni. Hal ini menjadi alasan dasar dilaksanakannya proyek Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Dumai Timur sebagai salah satu prioritas pembangunan infrastruktur pemerintah daerah.

Proyek ini dipandang layak dan mendesak untuk segera diselesaikan karena fungsinya yang sangat strategis bagi masyarakat luas. GOR Dumai Timur dirancang sebagai pusat kegiatan multifungsi yang dapat digunakan untuk berbagai cabang olahraga, sehingga diharapkan mampu memacu lahirnya bibit-bibit atlet berprestasi dari tingkat lokal. Selain itu, gedung ini juga berfungsi sebagai sarana interaksi sosial yang dapat menampung berbagai kegiatan publik, yang secara tidak langsung akan menghidupkan sektor ekonomi di lingkungan sekitarnya. Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat Dumai Timur akan memiliki wadah yang layak untuk melakukan aktivitas fisik maupun kegiatan sosial dalam lingkungan yang terorganisir.

Ditinjau dari sisi teknis konstruksi, pembangunan GOR Dumai Timur memiliki tingkat kompleksitas struktur yang tinggi karena harus mampu memikul beban orang dalam jumlah besar secara bersamaan. Oleh sebab itu, aspek keamanan dan kekuatan struktur menjadi fokus utama dalam setiap tahapan pelaksanaan di lapangan. Kondisi tanah di lokasi proyek menuntut perencanaan struktur bawah yang sangat teliti agar bangunan tetap stabil dan terhindar dari risiko penurunan di

masa depan. Penerapan metode kerja yang tepat, seperti penyesuaian dimensi pondasi *pile cap* sebagai pengganti lantai kerja serta penggunaan campuran beton yang sesuai standar kekuatan, dilakukan untuk menjamin kualitas bangunan agar dapat berfungsi secara aman dan tahan lama sebagai aset infrastruktur daerah.

1.2 Tujuan Proyek

Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Dumai Timur dilaksanakan dengan beberapa sasaran utama yang mencakup aspek pemenuhan fasilitas publik maupun aspek kekuatan konstruksi. Adapun tujuan dari proyek pembangunan ini adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan Fasilitas Olahraga yang Layak dan Modern
2. Mewujudkan gedung multifungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan wadah interaksi bagi warga sekitar.
3. Menjamin keamanan dan kekuatan struktur bangunan publik agar mampu menampung beban orang dalam jumlah banyak.
4. Mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur daerah guna mendorong pertumbuhan wilayah Kota Dumai.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah agar menjadi aset yang lebih produktif dan bermanfaat luas.

1.3 Tujuan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktek pada proyek Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Dumai Timur ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mempelajari peran dan tata cara kerja Drafter dalam menyusun gambar kerja (*shop drawing*) berdasarkan gambar rencana.
2. Memahami tugas dan tanggung jawab *Estimator* dalam melakukan perhitungan volume pekerjaan serta kebutuhan material di lapangan.
3. Mempelajari fungsi *Surveyor* dalam menentukan titik as, elevasi, dan ketepatan posisi struktur bangunan menggunakan alat ukur.
4. Memahami peran *Quality Control* (QC) dalam mengawasi mutu pekerjaan agar sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.

5. Mempelajari secara mendalam mengenai metode pelaksanaan serta urutan pengerjaan struktur beton bertulang pada bangunan gedung.

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam laporan kerja praktek ini dibatasi pada kegiatan dan pengamatan yang dilakukan mahasiswa selama melaksanakan kerja praktek di PT Prima Marindo Nusantara pada proyek pembangunan di kawasan GOR Dumai Timur. Pembahasan difokuskan pada beberapa aspek berikut:

1. Gambaran umum perusahaan dan struktur organisasi proyek.
2. Kegiatan mahasiswa dalam melakukan pengawasan pekerjaan konstruksi di lapangan.
3. Proses pendokumentasian progres pekerjaan harian selama berlangsungnya proyek.
4. Mekanisme pemeriksaan material yang masuk ke lokasi proyek serta pencatatan administrasinya.
5. Pengamatan terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di area proyek.

Ruang lingkup ini ditetapkan agar pembahasan laporan tetap terarah dan sesuai dengan aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama pelaksanaan kerja praktek.

1.5 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. PRIMA MARINDO NUSANTARA merupakan perusahaan swasta berskala nasional yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Perusahaan didirikan pada tahun 1997 berdasarkan Akte Pendirian Nomor 45 tanggal 9 Mei 2001 yang dibuat oleh Notaris H. Ismail, SH dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan Nomor C-10756 HT.01.01TH.2001 pada tanggal 17 Oktober 2001 dan dengan akte perubahan terakhirnya Nomor 03 tanggal 4 Maret 2019 dibuat oleh Notaris Arlisa Martini, SH, MKn. Pada saat ini PT. PRIMA MARINDO NUSANTARA berkomitmen untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui penerapan manajemen teknologi, penyediaan SDM yang bermutu, dan menjaga mutu dan

kualitas serta penyelesaian hasil pekerjaan tepat waktu guna meningkatkan kepuasan pelanggan secara nyata.

1.6 Visi dan Misi Perusahaan

Visi dan misi perusahaan merupakan pedoman utama yang menjadi arah dan tujuan dalam menjalankan kegiatan usaha, khususnya dalam bidang jasa konstruksi dan konsultansi. Visi mencerminkan cita-cita jangka panjang perusahaan mengenai posisi dan peran yang ingin dicapai di masa depan, sedangkan misi menggambarkan langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut melalui kegiatan operasional sehari-hari.

Bagi perusahaan jasa konstruksi, visi dan misi memiliki peranan penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, perencanaan pekerjaan, serta pelaksanaan proyek di lapangan. Visi dan misi juga menjadi acuan dalam menjaga kualitas pekerjaan, profesionalisme sumber daya manusia, serta komitmen perusahaan terhadap kepuasan pengguna jasa dan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap visi dan misi perusahaan tempat pelaksanaan kerja praktek menjadi hal yang penting bagi saya, karena dapat memberikan gambaran mengenai nilai-nilai, tujuan, serta arah pengembangan perusahaan. Dengan memahami visi dan misi tersebut, saya dapat menyesuaikan sikap, pola kerja, dan tanggung jawab selama melaksanakan kerja praktek agar sejalan dengan budaya dan tujuan perusahaan.

Berikut ini merupakan visi dan misi dari PT. Prima Marindo Nusantara yaitu sebagai berikut:

1. Visi

PT. PRIMA MARINDO NUSANTARA akan menjadi salah satu perusahaan konstruksi berskala nasional yang terbaik di Indonesia yang akan mengutamakan penerapan manajemen teknologi, penyediaan SDM yang bermutu, tata kelola perusahaan yang baik serta menjaga mutu kualitas hasil pekerjaan.

2. Misi

PT. PRIMA MARINDO NUSANTARA akan meningkatkan daya saing perusahaan dibidang jasa konstruksi guna memberikan layanan terbaik kepada

konsumen dan pemberi kerja. Meningkatkan pelatihan SDM untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas yang mampu bersaing di dunia usaha

1.7 Struktur Proyek

Struktur proyek merupakan kerangka fundamental yang merepresentasikan distribusi tugas, hierarki wewenang, serta mekanisme koordinasi yang sistematis antar seluruh pihak yang terlibat dalam siklus pembangunan. Implementasi struktur yang terorganisir berfungsi sebagai instrumen kendali untuk memastikan setiap personil beroperasi sesuai cakupan fungsinya masing-masing, guna meminimalisir ambiguitas tanggung jawab, menjaga efektivitas komunikasi jalur birokrasi, serta mengoptimalkan proses pengambilan keputusan strategis di lapangan.

Dalam pelaksanaan proyek Pembangunan GOR Multifungsi ini, manajemen organisasi diklasifikasikan ke dalam dua pilar utama yang saling bersinergi, yakni struktur hubungan kerja yang mengatur kontrak hukum serta garis instruksi dan koordinasi antara Pemilik Proyek (*Owner*), Konsultan Pengawas, dan Kontraktor Pelaksana, yang kemudian diturunkan ke dalam struktur organisasi internal untuk memetakan alokasi personil manajerial beserta tanggung jawab teknis operasional kontraktor dalam mengeksekusi target fisik di lapangan.

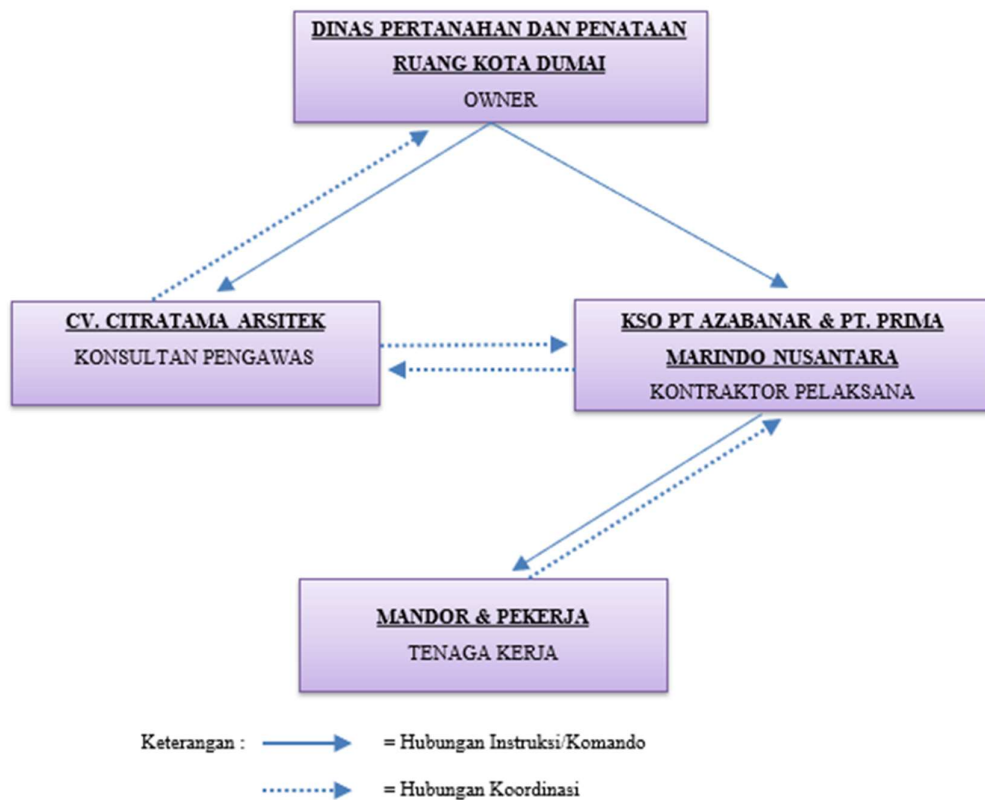
Penjelasan mendalam mengenai rincian kedua jenis struktur tersebut diuraikan sebagai berikut:

1.7.1 Struktur Hubungan Kerja

Struktur hubungan kerja mendefinisikan pola interaksi formal, hierarki birokrasi, serta keterikatan fungsional yang mengikat seluruh instansi di dalam ekosistem proyek. Skema ini berfungsi untuk memetakan batasan wewenang dan tanggung jawab secara spesifik, mulai dari peran strategis pemilik proyek (*Owner*) dalam menetapkan kebijakan anggaran serta sasaran fungsional bangunan, hingga peran konsultan pengawas sebagai representasi teknis yang menjalankan fungsi pengawasan ketat terhadap pengendalian mutu (*Quality Control*) dan kesesuaian progres di lapangan.

Lebih lanjut, struktur ini mengatur alur instruksi kepada kontraktor pelaksana sebagai penanggung jawab utama operasional konstruksi yang

mengintegrasikan sumber daya material, alat, serta tenaga kerja. Dalam hal ini, mandor dan pekerja diposisikan sebagai ujung tombak eksekusi fisik yang geraknya dikendalikan langsung melalui koordinasi teknis dari kontraktor guna memastikan setiap item pekerjaan memenuhi standar spesifikasi yang telah disepakati dalam dokumen kontrak. Keseluruhan sinergi antar pihak ini divisualisasikan dalam bagan hubungan kerja sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Hubungan Kerja
 Sumber: Data Perusahaan

Dalam skema ini, terdapat dua jenis garis yang menggambarkan pola interaksi antar pihak yang terlibat dalam proyek. Garis tegas digunakan untuk merepresentasikan hubungan komando atau hubungan kontrak yang bersifat instruktif dan mengikat secara hukum. Sementara itu, garis putus-putus digunakan untuk menggambarkan hubungan koordinasi, yang menunjukkan adanya jalur

konsultasi dan komunikasi teknis tanpa adanya wewenang untuk memberikan perintah langsung.

Berdasarkan pembagian garis tersebut, rincian hubungan kerja pada proyek ini adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan antara *Owner* kepada Konsultan Pengawas
- b. Hubungan antara *Owner* kepada Kontraktor Pelaksana
- c. Hubungan antara Konsultan Pengawas kepada *Owner*
- d. Hubungan antara Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana
- e. Hubungan antara Kontraktor Pelaksana kepada Tenaga Kerja
- f. Hubungan antara Tenaga Kerja kepada Kontraktor Pelaksana

Dalam skema ini, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak dijabarkan untuk memastikan kendali proyek berjalan sesuai prosedur, yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik Proyek (*Owner*)

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai selaku pemilik proyek memiliki wewenang tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis dan penyediaan anggaran. *Owner* berhak memberikan instruksi langsung kepada Kontraktor Pelaksana maupun Konsultan Pengawas, serta memiliki otoritas penuh untuk menerima atau menolak hasil pekerjaan berdasarkan kesesuaian dengan dokumen kontrak.

2. Konsultan Pengawas (MK)

CV. Citratama Arsitek berperan sebagai wakil dari *Owner* di lapangan yang memiliki wewenang dalam pengendalian teknis dan administratif. Wewenangnya meliputi pengawasan metode kerja, pengujian mutu material, hingga memberikan rekomendasi persetujuan atas progres pekerjaan yang diajukan oleh kontraktor. Konsultan pengawas berhak menghentikan pekerjaan jika ditemukan ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis.

3. Kontraktor Pelaksana

KSO PT. Azabanar & PT. Prima Marindo Nusantara memiliki wewenang penuh dalam pengaturan operasional di lapangan, mulai dari mobilisasi alat, material, hingga pengaturan tenaga kerja. Kontraktor bertanggung jawab mengeksekusi instruksi dari *Owner* dan Pengawas ke dalam bentuk fisik bangunan, serta memastikan seluruh aspek teknis dan keselamatan kerja terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan.

4. Tenaga Kerja

Mandor dan pekerja merupakan personil di bawah garis instruksi langsung Kontraktor Pelaksana. Wewenang mereka terbatas pada pelaksanaan teknis pekerjaan fisik di lapangan berdasarkan arahan dan gambar kerja (*shop drawing*) yang telah disetujui, dengan kewajiban menjaga kualitas hasil pekerjaan pada tingkat dasar.

Untuk memperjelas susunan organisasi hubungan kerja beserta peran dan tanggung jawab masing-masing jabatan, struktur organisasi hubungan kerja disajikan dalam bentuk tabel yang memuat nama instansi, peran, dan wewenang utamanya, berikut adalah tabelnya:

Tabel 1. 1 Struktur Organisasi Hubungan Kerja Pembangunan GOR Multifungsi

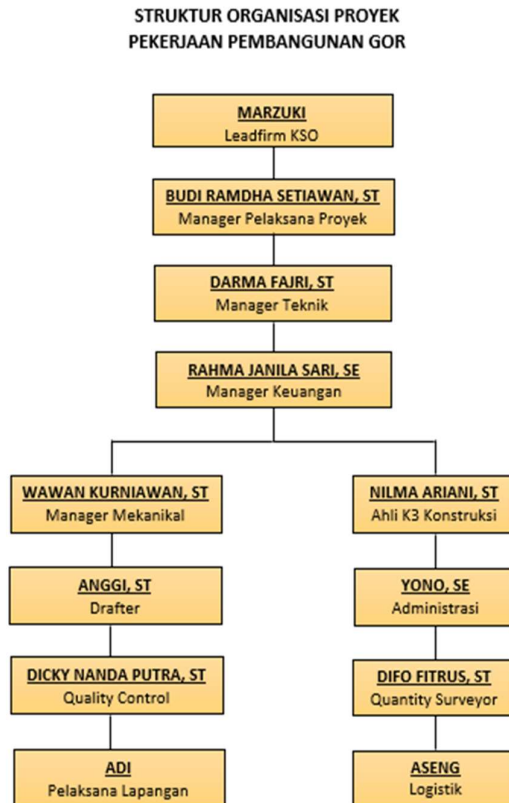
No	Instansi	Peran	Wewenang
1	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	Owner	Pemilik otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis dan penyediaan anggaran proyek.
2	CV. Citratama Arsitek	Konsultan Pengawas	Melakukan kendali mutu serta memberikan instruksi atau teguran teknis atas pelaksanaan di lapangan.
3	KSO PT. Azabanar & PT. Prima Marindo Nusantara	Kontraktor Pelaksana	Bertanggung jawab penuh atas manajemen lapangan, ketersediaan sumber daya, dan eksekusi fisik bangunan.
4	Mandor dan Pekerja	Tenaga Kerja	Melaksanakan pekerjaan fisik di lapangan sesuai dengan instruksi kerja dan gambar rencana.

1.7.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi perusahaan merupakan susunan yang menggambarkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing personel dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Struktur organisasi yang jelas sangat diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan peran masing-masing pihak.

Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, struktur organisasi juga berfungsi sebagai sarana koordinasi antara pimpinan, staf teknis, pengawas lapangan, dan tenaga kerja lainnya. Dengan adanya struktur organisasi yang tertata dengan baik, proses komunikasi dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih terarah dan efisien.

Berikut ini merupakan struktur organisasi perusahaan tempat saya melaksanakan kerja praktek:



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Proyek
Sumber: Data Perusahaan

Setiap pelaksana dalam struktur memiliki jabatan dan fungsi yang berbeda-beda, berikut fungsi dan tugas yang ada di setiap jabatan:

1. Leadfirm KSO

Leadfirm KSO merupakan pihak utama dalam kerja sama operasi (KSO) yang bertanggung jawab sebagai koordinator pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Leadfirm KSO berperan dalam pengambilan keputusan strategis, pengendalian umum proyek, serta menjadi perwakilan utama perusahaan dalam berkoordinasi dengan pemilik pekerjaan (*owner*) dan pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, Leadfirm KSO memastikan bahwa pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan kontrak, peraturan, serta target mutu, waktu, dan biaya yang telah ditetapkan, yang memegang jabatan ini adalah Marzuki.

2. Manajer Pelaksana Proyek

Manajer Pelaksana Proyek memiliki tanggung jawab langsung terhadap pengelolaan dan pelaksanaan proyek di lapangan. Jabatan ini berfungsi mengoordinasikan seluruh kegiatan proyek, mulai dari perencanaan pelaksanaan, pengaturan sumber daya, hingga pengendalian progres pekerjaan. Manajer Pelaksana Proyek juga bertugas memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan jadwal yang telah direncanakan, serta menjadi penghubung utama antara pihak manajemen, konsultan pengawas, dan pelaksana lapangan, yang memegang jabatan ini adalah Budi Ramdha Setiawan, ST.

3. Manajer Teknik

Manajer Teknik berperan dalam mengendalikan aspek teknis pekerjaan konstruksi. Tanggung jawab utama Manajer Teknik meliputi pengawasan metode pelaksanaan pekerjaan, evaluasi kesesuaian pekerjaan dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis, serta penyelesaian permasalahan teknis yang muncul di lapangan. Selain itu, Manajer Teknik juga terlibat dalam pengecekan mutu pekerjaan struktur dan memberikan arahan teknis kepada tim pelaksana agar hasil pekerjaan memenuhi standar yang dipersyaratkan, yang memegang jabatan ini adalah Darma Fajri, ST.

4. Manajer Mekanikal Elektrikal

Manajer Mekanikal Elektrikal bertanggung jawab terhadap seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan sistem mekanikal dan elektrikal pada bangunan. Jabatan ini berfungsi mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan instalasi listrik, sistem pencahayaan, serta sistem mekanikal lainnya yang terdapat pada bangunan GOR. Manajer Mekanikal Elektrikal memastikan bahwa seluruh pekerjaan MEP terpasang dengan baik, aman, dan sesuai dengan peraturan serta standar teknis yang berlaku, yang memegang jabatan ini adalah Wawan Kurniawan, ST.

5. Manajer Keuangan

Manajer Keuangan memiliki peran penting dalam pengelolaan aspek keuangan proyek. Tugas utamanya meliputi pengendalian anggaran, pencatatan

pengeluaran dan pemasukan, serta pengelolaan administrasi keuangan proyek. Manajer Keuangan juga berperan dalam memastikan penggunaan dana proyek berjalan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang telah disusun, yang memegang jabatan ini adalah Rahma Janila Sari, SE.

6. Ahli K3 Konstruksi

Ahli K3 Konstruksi bertanggung jawab dalam penerapan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) selama pelaksanaan proyek. Jabatan ini berfungsi menyusun dan menerapkan prosedur K3, melakukan sosialisasi keselamatan kerja kepada seluruh pekerja, serta mengawasi penggunaan alat pelindung diri (APD) di lapangan. Ahli K3 Konstruksi juga berperan dalam mengidentifikasi potensi bahaya, mencegah terjadinya kecelakaan kerja, dan memastikan bahwa seluruh aktivitas proyek dilaksanakan sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku, yang memegang jabatan ini adalah Nilma Ariani, ST.

7. Drafter

Drafter memiliki tanggung jawab dalam menerjemahkan desain teknis menjadi gambar kerja (*shop drawing*) yang detail dan akurat sebagai panduan pelaksanaan di lapangan. Jabatan ini berfungsi memastikan setiap perubahan teknis terdokumentasi dengan baik dalam gambar revisi, serta melakukan koordinasi dengan tim teknik untuk memastikan bahwa gambar yang digunakan telah divalidasi dan sesuai dengan kondisi aktual di lokasi proyek, yang memegang jabatan ini adalah Anggi, ST.

8. Administrasi

Administrasi bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh dokumentasi dan korespondensi operasional proyek. Jabatan ini berfungsi menyusun laporan berkala, mengelola pengarsipan data teknis maupun non-teknis, serta mendukung kelancaran administrasi personel guna memastikan seluruh kegiatan pendukung di kantor lapangan berjalan dengan tertata dan sistematis, yang memegang jabatan ini adalah Yono, SE.

9. *Quality Control* (QC)

Quality Control bertanggung jawab dalam menjamin bahwa setiap tahapan pekerjaan konstruksi memenuhi standar mutu dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Jabatan ini berfungsi melakukan pengawasan serta pengujian material dan hasil pekerjaan secara berkala, seperti memastikan tingkat kepadatan tanah timbunan telah sesuai standar, guna memastikan integritas bangunan terjaga dengan baik, yang memegang jabatan ini adalah Dicky Nanda Putra, ST.

10. *Quantity Surveyor* (QS)

Quantity Surveyor memiliki peran dalam pengendalian volume pekerjaan dan manajemen biaya selama masa konstruksi. Jabatan ini berfungsi melakukan perhitungan kebutuhan material, memverifikasi progres fisik untuk dasar penagihan, serta mengelola administrasi pembayaran agar penggunaan sumber daya tetap terkendali dan sesuai dengan volume yang terpasang di lapangan, yang memegang jabatan ini adalah Difo Fitrus, ST.

11. Logistik

Logistik bertanggung jawab terhadap pengadaan dan distribusi material yang dibutuhkan dalam setiap tahapan pekerjaan. Jabatan ini berfungsi mengatur jadwal kedatangan armada pengangkut, melakukan inspeksi terhadap jumlah dan kondisi material yang datang di gudang, serta memastikan ketersediaan stok material agar proses pelaksanaan di lapangan tidak mengalami kendala teknis, yang memegang jabatan ini adalah Aseng.

12. Pelaksana Lapangan

Pelaksana Lapangan memiliki tanggung jawab utama dalam mengoordinasikan dan mengarahkan seluruh tenaga kerja di lokasi konstruksi agar pekerjaan berjalan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Jabatan ini berfungsi mengatur pembagian tugas harian kepada kelompok tukang dan pekerja, mengawasi produktivitas di lapangan, serta memastikan bahwa tenaga kerja bekerja dengan efektif mengikuti metode yang telah ditentukan. Pelaksana Lapangan menjadi penghubung komunikasi langsung untuk memastikan setiap arahan teknis dari

manajemen dapat diterapkan secara tepat oleh para pekerja di lapangan, yang memegang jabatan ini adalah Adi.

Untuk memperjelas susunan organisasi pelaksana proyek beserta peran dan tanggung jawab masing-masing jabatan, berikut di jabarkan dalam bentuk tabel:

Tabel 1. 2 Struktur Organisasi Proyek Pembangunan GOR Multifungsi

No	Nama	Jabatan	Fungsi
1	Marzuki	<i>Leadfirm</i> KSO	Koordinator utama proyek
2	Budi Ramdha Setiawan, ST	Manajer Pelaksana Proyek	Mengelola dan mengendalikan seluruh kegiatan proyek di lapangan
3	Darma Fajri, ST	Manajer Teknik	Mengendalikan aspek teknis konstruksi
4	Rahma Janila Sari, SE	Manajer Keuangan	Mengelola administrasi dan keuangan proyek
5	Wawan Kurniawan, ST	Manajer <i>Mekanikal Elektrikal</i>	Mengelola pekerjaan sistem mekanikal dan elektrikal
6	Nilma Ariani, ST	Ahli K3 Konstruksi	Mengawasi penerapan K3
7	Anggi, ST	<i>Drafter</i>	Membuat dan merevisi gambar kerja (<i>shop drawing</i>)
8	Yono, SE	Administrasi	Mengelola dokumentasi operasional proyek
9	Dicky Nanda Putra, ST	Quality Control	Menjamin hasil pekerjaan memenuhi spesifikasi
10	Difo Fitrus, ST	Quantity Surveyor	Mengendalikan volume pekerjaan.
11	Aseng	Logistik	Mengatur Pengadaan dan Dsitribusi Stok Dilapangan
12	Adi	Pelaksana Lapangan	Mengoordinasikan dan mengarahkan tenaga kerja